ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dari Aspek Larangan dan Batasannya Terhadap Penyanyi Orkes Melayu Dangdut dalam Prespektif *Fiqh Siyâsah***" ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi larangan dan batasan pornografi terhadap penyanyi orkes melayu dangdut dalam pandangan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan bagaimana pandangan *Fiqh Siyâsah* terhadap implementasi larangan dan batasan Pornografi penyanyi orkes melayu dangdut dalam konteks Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Data penelitian diperoleh dari segala sumber, baik media cetak maupun elektronik terkait pelanggaran pornografi yang dilakukan oleh penyanyi orkes melayu dangdut. Pengumpulan data penelitian dihimpun melalui obeservasi non partisipan terhadap aksi panggung penyanyi orkes dangdut dan selanjutnya dianalisis dengan teknik pendekatan deskriptif-deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larangan dan batasan pornografi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 belum terimplementasi secara meneyeluruh. Hasil analisis mengatakan bahwa larangan dan batasan pornografi tersebut seakan-akan hanya aturan yang hanya dibuat ketika muncul peristiwa tertentu saja dan para penyanyi orkes melayu dangdut pun sampai sejauh ini masih banyak melanggar larangan dan batasan tersebut. jadi di sini jelas, bahwa antara aturan yang berlaku dengan fenomena yang ada terjadi ketidaksesuaiaan hukum.

Ditinjau dari hukum Islam, tindakan pornografi yang dilakukan penyanyi orkes melayu dangdut merupakan perbuatan yang dipandang tidak baik dan dibenci manusia karena bertentangan dengan syari'at Islam dan diancam oleh Allah dengan hukuman ta'zir.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan secara ketat terhadap berbagai jenis pertunjukan atau penampilan yang disuguhkan penyanyi wanita orkes melayu dangdut. Selain itu juga undang-undang tentang pornografi ini sudah saatnya untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Tujuannya adalah sebagai alat untuk mempertegas aturan yang sudah dibuat dalam undang-undang tersebut, serta bantuan peran serta aparat penegak hukum dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu tegaknya hukum yang ada di Negara kita ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id